



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – PD) BAPPENDA TAHUN 2022



Pemerintah Daerah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah
Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon : (022) 6652559 Fax : (022) 6652559 Website : cimahikota.go.id
E-mail : bappenda@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 050 / 616 / Bappenda

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) menjadi pedoman unit kerja perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2022 sebagai pedoman unit kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2022;

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disingkat RENJA PD, merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2022;

- KETIGA : Isi dan uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal, 0 Agustus 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAH



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Cimahi serta merupakan turunan dari Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara umum, Bappenda Kota Cimahi telah dapat melaksanakan program/ kegiatan pada tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 Bappenda Kota Cimahi merencanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.651.462.996,- (*dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*), untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang Bappenda Kota Cimahi yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappenda Kota Cimahi membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Cimahi, Agustus 2021

KEPALA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi	II-1
2.2 Analisis Kinerja Bappenda Kota Cimahi	II-20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappenda	II-28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-35
2.6 Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022	II-40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran	III-3
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020	II-2
Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Bappenda Kota Cimahi Semester I Tahun 2021	II-9
Tabel 2.3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	II-21
Tabel 2.4. Analisis Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-21
Tabel 2.5. Komposisi PAD Kota Cimahi Tahun 2020	II-22
Tabel 2.6. Rata-Rata Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi	II-23
Tabel 2.7. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2020	II-24
Tabel 2.8. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017-2020	II-24
Tabel 2.9. Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2020	II-25
Tabel 2.10. Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017-2020	II-26
Tabel 2.11. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepntingan Tahun 2022 Kota Cimahi	II-36
Tabel 2.12. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022	II-41
Tabel 2.13. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-44
Tabel 2.14. Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022	II-45
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022	III-4
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022	IV-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Strategi Peningkatan Asli Daerah (PAD)	II-27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan rencana tahunan kelima dalam pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang memuat rencana capaian indikator-indikator sebagai ukuran keberhasilan. Pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya. Berkaitan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal agar tidak selalu bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat sangat strategisnya posisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam dinamika pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, maka Rencana Kerja (RENJA) Bappenda Kota Cimahi lebih ditekankan kepada peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dari

sektor pajak daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Cimahi, karena untuk mewujudkan Visi Kinerja Pembangunan Kota Cimahi tentunya harus bergantung pada realisasi pendapatan daerah yang besar.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 adalah manifestasi dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu di dalam Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Cimahi terkait peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik maupun Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Disamping itu, Renja yang disusun ini perlu disinkronisasi juga, dengan acuan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122);
 21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
 22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 disusun untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lingkup perangkat daerah maupun tingkat Kota Cimahi dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 serta visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

1.3.1. Maksud

- a. Menjadi Pedoman bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi didalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- c. Menjadi bahan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam menyusun Anggaran Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;

- b. Melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif.
- c. Melakukan pengukuran, evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun ke tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2022, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Bappenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja bappenda, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama setahun.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi yang akan dicapainya pada Tahun Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu rancangan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun sebelumnya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi tahun sebelumnya ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019, dan 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021, dan realisasi renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda dan realisasi APBD.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Bappenda Kota Cimahi
Periode Pelaksanaan Tahun 2020

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2019))		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
A	Meningkatnya PAD		Persentase (%) peningkatan PAD	1,95%	7.259.909.186	7,74%	4.355.689.500	-8,07%	3.007.001.686	4,08%	2.839.823.287	250,56%	94,44%	4,08%	7.195.512.787	209,23%	99,11%
I		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.396.386.143		1.439.591.707		956.794.436		900.778.117		94,15%		2.340.369.824		97,66%
			Persentase Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	100%	2.396.386.143	80%	1.439.591.707	100%	956.794.436	100%	900.778.117	100%	94,15%	100%	2.340.369.824	100%	97,66%
1		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan	24 bulan	305.967.524	12	197.987.600	12	107.979.924	12	107.653.500	100%	99,70%	24	305.641.100	100%	99,89%
2		Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	jumlah bulan	24 bulan	41.037.768	12	14.337.768	12	26.700.000	12	21.326.519	100%	79,87%	24	35.664.287	100%	86,91%
3		Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	jumlah bulan	24 bulan	218.533.579	12	114.353.579	12	104.180.000	12	102.695.035	100%	98,57%	24	217.048.614	100%	99,32%
4		Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	jumlah kendaraan	60 unit/ kali	632.609.482	33	422.447.982	60	210.161.500	60	179.417.600	100%	85,37%	60	601.865.582	100%	95,14%
5		Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	jumlah unit peralatan kantor	76 unit	259.838.350	45	60.202.000	31	199.636.350	31	199.446.350	100%	99,90%	76	259.648.350	100%	99,93%
6		Penyediaan gudang kantor	jumlah gudang	2 gudang	118.500.000	1	60.500.000	1	58.000.000	1	58.000.000	100%	100%	2	118.500.000	100%	100%
7		Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah set	11 set	17.765.262	8	15.799.000	3	1.966.262	3	1.926.100	100%	97,96%	11	17.725.100	100%	99,77%
8		Penataan arsip daerah	jumlah arsip	8000 lbr	217.487.210	4.000	133.487.210	4000	84.000.000	4.000	75.371.200	100%	89,73%	8.000	208.858.410	100%	96,03%

9		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	jumlah bulan	24 bulan	58.738.832	12	3.992.432	12	54.746.400	12	49.884.013	100%	91,12%	24	53.876.445	100%	91,72%
10		Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan	24 bulan	94.050.444	12	57.864.444	12	36.186.000	12	34.431.000	100%	95,15%	24	92.295.444	100%	98,13%
11		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	24 bulan	102.156.500	12	62.432.500	12	39.724.000	12	37.282.300	100%	93,85%	24	99.714.800	100%	97,61%
12		Koordinasi dan konsultasi kedinasan	jumlah perjalanan dinas	1086 OH	329.701.192	933	296.187.192	153	33.514.000	153	33.344.500	100%	99,49%	1.086	329.531.692	100%	99,95%
II		Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	% ASN yang dibina	100%	38.482.000	80%	25.982.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	100%	100%	38.482.000	100%	100%
13		Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	jumlah ASN yang dibina dan dilatih	90 Org	38.482.000	90	25.982.000	72	12.500.000	72	12.500.000	100%	100%	90	38.482.000	100%	100%
III		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			271.384.691		145.943.441		125.441.250,00		121.229.400,00		96,64%		267.172.841,00		98,45%
			Nilai LAKIP	78,1	179.175.244	77,06	94.852.994	78,10	84.322.250,00	75,92	81.682.000,00	97,21	96,87%	75,92	176.534.994,00	97,21	98,53%
14		Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	jumlah dokumen	18 dok	116.761.944	9	78.013.944	9	38.748.000	9	37.468.000	100%	96,70%	18	115.481.944	100%	98,90%
15		Penyusunan Renstra & Renja PD	jumlah dokumen	18 dok	62.413.300	9	16.839.050	9	45.574.250	3	44.214.000	33%	97,02%	12	61.053.050	67%	97,82%
			Persentase Realisasi Anggaran	95,34%	92.209.447,00	93,12%	51.090.447,00	95,34%	41.119.000,00	94,44%	39.547.400,00	99,06%	96,18%	94,44%	90.637.847,00	99,06%	98,30%
16		Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	jumlah dokumen	8 dok	9.705.400	4	7.226.400	4	2.479.000	4	2.257.400	100%	91,06%	8	9.483.800	100%	97,72%
17		Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	5 dok	82.504.047	3	43.864.047	2	38.640.000	2	37.290.000	100%	96,51%	5	81.154.047	100%	98,36%
IV		Program Perencanaan, Pengelolaan			4.553.656.352		2.744.172.352		1.912.266.000		1.805.315.770		94,41%		4.549.488.122		99,91%

		Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Per Tahunnya	-16,03%	3.211.853.198	21,05%	1.789.388.198	-16,03%	1.422.465.000	-2,57%	1.342.701.500	183,97%	94,39%	-2,57%	3.132.089.698	183,97%	97,52%
18		Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	5 Modul	1.026.397.089	3	580.347.089	2	446.050.000	2	420.870.000	100%	94,35%	5	1.001.217.089	100%	97,55%
			Jumlah bulan	24 bulan		12		12		12		100%		24		100%	
19		Kegiatan Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah dokumen kegiatan	6 dok	182.765.936	4	86.533.936	2	96.232.000	2	89.481.400	100%	92,99%	6	176.015.336	100%	96,31%
20		Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan di distribusikan	265.111 lbr	1.036.125.725	157.500	502.147.725	107.611	533.978.000	117.611	500.257.500	109,29%	93,69%	275.111	1.002.405.225	103,77%	96,75%
			Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang di distribusikan	265.000 lbr		157.500		107.611		117.611		109,29%		275.111		103,82%	
21		Kegiatan Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/ di validasi	110.580 Data	966.564.448	134.330	620.359.448	110.580	346.205.000	110.550	332.092.600	99,97%	95,92%	110.550	952.452.048	99,97%	98,54%
			Realisasi Target Pendapatan Daerah	90%	1.341.803.154	94,59%	954.784.154	90%	489.801.000	99,67%	462.614.270	110,74	94,45%	99,67%	1.417.398.424	110,74%	105,63 %
22		Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda pajak / produk hukum	2 dok	115.413.000	1	120.572.000	1	97.623.000	1	89.768.000	100%	91,95%	2	210.340.000	100%	182,25 %
23		Kegiatan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD terkait	119 Kali	328.758.388	72	193.823.138	47	134.935.250	47	130.055.793	100%	96,38%	119	323.878.931	100%	98,52%

24		Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak yang di periksa	1.500 Objek Pajak	193.018.204	1.200	144.383.204	300	48.635.000	300	44.860.000	100%	92,24%	1.500	189.243.204	100%	98,04%
25		Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	750 orang	289.476.028	500	245.385.528	250	44.090.500	250	36.258.277	100%	82,24%	750	281.643.805	100%	97,29%
26		Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Persentase realisasi jumlah WP yang membayar pajak	70 %	415.137.534	68,49%	250.620.284	70	164.517.250	67,67	161.672.200	97%	98,27%	68	412.292.484	97%	99,31%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					7.259.909.186		4.355.689.500		3.007.001.686		2.839.823.287				11.745.000.909		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												113,40%	91,85%	75,93%	880.731.575,83	117,71%	99,89%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : sinergitas yang baik antara setiap bagian/bidang untuk mendukung kinerja dalam menjalankan fungsinya																	
Faktor Penghambat keberhasilan kinerja : -																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : -																	

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dan capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2020, sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 375.687.242.678,91 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 360.955.331.172,96, terrealisasi peningkatannya sebesar 4,08% dari target -8,07%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan **sangat baik**.
- Hasil pengukuran kinerja capaian kinerja program Bappenda Kota Cimahi terdiri dari :
 1. Program perencanaan, pengelolaan anggaran daerah, barang milik daerah, dan perbendaharaan daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya :
 - a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 158.937.237.899 sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 163.136.977.065, dengan terrealisasi peningkatannya sebesar -2,57% dari target -16,03%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka nilai kinerjanya dikatakan sangat baik.
 - b. Realisasi target pendapatan daerah
Hasil pengukuran kinerja realisasi target pendapatan daerah terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut bahwa realisasi pendapatan daerah tahun berjalan sebesar Rp. 1.457.996.459.899,91 sedangkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.462.841.536.679,92, dengan persentase capaian sebesar 99,67%, maka nilai kinerjanya dikatakan mempunyai makna baik.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor, mempunyai indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang dipelihara, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dilihat berdasarkan dari jumlah jenis sarana dan prasarana yang ada di setiap ruangan kerja yang tertuang dalam kartu inventaris ruangan (KIR), dari 23 ruangan ada sebanyak 217 jenis sarana prasarana yang terinventarisir dan sebanyak 217 jenis sarana dan prasarana dalam kondisi baik, ruangan-ruangan tersebut.
 3. Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, mempunyai indikator kinerja Persentase ASN yang dibina, dengan capaian kinerja 100%, dilihat dari jumlah ASN yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 71 pegawai.
 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama nilai LAKIP Bappenda Kota Cimahi, nilai yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 75,92, Sementara pada tahun 2019 perolehan nilai sebesar 77,06, adanya penurunan, namun masih dengan kategori BB dan interpretasi sangat baik, akuntabel. Berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Selain itu untuk indikator kedua persentase realisasi anggaran, dimana target kinerja yang ditetapkan 95,34% dengan realisasi kinerja 94,44% capaian kinerjanya 99,06%.
- Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020 terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), terkait persentase PAD dari tahun sebelumnya terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dari target capaian kondisi akhir sebesar 1,95%, sedangkan untuk target capaian kinerja rencana strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 sebesar -8,07%, terrealisasi pada periode tahun ketiga

sebesar 4,08% dengan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 250,56%, capaian tersebut dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik, akibat dari peristiwa Pandemi Covid-19. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan PAD.

- Realisasi anggaran belanja langsung sebagai pelaksanaan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan kinerja di capaian tahun 2020 yaitu, realisasi keuangan sebesar 94,44% bila dibandingkan dengan realisasi kinerja adalah lebih dari 100%, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan.
- Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.839.823.287,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.007.001.686,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,56%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah yang persentasenya mencapai 17,76%, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang persentasenya mencapai 20,13%, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang persentasenya mencapai 14,63%, selain itu pada kegiatan penataan arsip daerah yang persentasenya mencapai 10,27%.

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Bappenda Kota Cimahi
Periode Pelaksanaan Semester I Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Predikat	28.397.105.396	0	-	B	11.004.930.396	Belum Bisa Diukur	3.992.002.481	Belum Bisa Diukur	36,27	Belum Bisa Diukur	3.992.002.481	Belum Bisa Diukur	14,06
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,10 Indeks	28.397.105.396	0	-	60,10	11.004.930.396	Belum Bisa Diukur	3.992.002.481	Belum Bisa Diukur	36,27	Belum Bisa Diukur	3.992.002.481	Belum Bisa Diukur	14,06
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100 %		0		100		50		50,00		50		50,00	
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	76,19 %		0		64,29		0		0,00		0		0,00	
1		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	29 dok	307.867.300	0	-	15	147.867.300	8	72.532.140	53,33	49,05	8	72.532.140	27,59	23,56

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	8 dok	162.011.800	0	-	4	77.011.800	0	35.239.270	0,00	45,76	0	35.239.270	0,00	21,75
			Jumlah dokumen renja	2 dok		0		1		1		100,00		1		50,00	
			Jumlah dokumen renstra perubahan	1 dok		0		1		1		100,00		1		100,00	
			Jumlah dokumen renja perubahan	2 dok		0		1		0		0,00		0		0,00	
			Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	2 keg		0		1		1		100,00		1		50,00	
		SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	2 dok	145.855.500	0	-	1	70.855.500	1	37.292.870	100,00	52,63	1	37.292.870	50,00	25,57
			Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	4 dok		0		2		2		100,00		2		50,00	
			jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	8 dok		0		4		2		50,00		2		25,00	
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	2 dok	25.355.252.896	0	-	2	9.805.252.896	1	3.484.482.352	50,00	35,54	1	3.484.482.352	50,00	13,74
		SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	24 bln	25.257.606.096	0	-	12	9.757.606.096	6	3.460.711.982	50,00	35,47	6	3.460.711.982	25,00	13,70

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	4 dok	97.646.800	0	-	2	47.646.800	1	23.770.370	50,00	49,89	1	23.770.370	25,00	24,34
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina	71 peg	155.250.000	0	-	71	25.250.000	70	18.400.000	98,59	72,87	70	18.400.000	98,59	11,85
		SubKeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	68 stel	70.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
		SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	10 peg	85.250.000	0	-	5	25.250.000	0	18.400.000	0,00	72,87	0	18.400.000	0,00	21,58
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	24 bln	1.404.811.000	0	-	12	460.311.000	6	131.122.573	50,00	28,49	6	131.122.573	25,00	9,33

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	24 bln	5.899.800	0	-	12	2.399.800	6	1.178.100	50,00	49,09	6	1.178.100	25,00	19,97
		SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	23 unit	804.434.700	0	-	11	174.434.700	0	52.801.792	0,00	30,27	0	52.801.792	0,00	6,56
			Jumlah bulan penyediaan ATK	24 bln		0		12		6		50,00		6		25,00	
		SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	38 jenis	17.892.400	0	-	18	7.892.400	18	7.892.400	100,00	100,00	18	7.892.400	47,37	44,11
		SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	24 bln	163.390.000	0	-	12	81.390.000	6	34.510.470	50,00	42,40	6	34.510.470	25,00	21,12
		SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	24 bln	175.669.100	0	-	12	85.669.100	6	4.294.531	50,00	5,01	6	4.294.531	25,00	2,44

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	12 bln	14.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
		SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	24 bln	30.000.000	0	-	12	15.000.000	6	3.000.000	50,00	20,00	6	3.000.000	25,00	10,00
		SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	24 bln	193.525.000	0	-	12	93.525.000	6	27.445.280	50,00	29,35	6	27.445.280	25,00	14,18
5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gudang kantor yang diadakan	24 bln	155.350.000	0	-	12	77.675.000	6	60.000.000	50,00	77,24	6	60.000.000	25,00	38,62
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang kantor	24 bln	155.350.000	0	-	12	77.675.000	6	60.000.000	50,00	77,24	6	60.000.000	25,00	38,62
6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24 bln	254.104.200	0	-	12	124.104.200	6	49.502.896	50,00	39,89	6	49.502.896	25,00	19,48

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	24 bln	195.904.200	0	-	12	95.904.200	6	40.631.940	50,00	42,37	6	40.631.940	25,00	20,74
		SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	24 bln	58.200.000	0	-	12	28.200.000	6	8.870.956	50,00	31,46	6	8.870.956	25,00	15,24
			Jumlah bulan jasa listrik	24 bln		0		12		6		50,00		6		25,00	
7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	24 bln	764.470.000	0	-	12	364.470.000	6	175.962.520	50,00	48,28	6	175.962.520	25,00	23,02
		SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	24 bln	618.970.000	0	-	12	298.970.000	6	127.102.520	50,00	42,51	6	127.102.520	25,00	20,53
			Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit		0		10		3		30,00		3		30,00	
			Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit		0		1		0		0,00		0		0,00	
			Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit		0		10		10		100,00		10		100,00	
			Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit		0		10		6		60,00		6		60,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	24 bln	145.500.000	0	-	12	65.500.000	6	48.860.000	50,00	74,60	6	48.860.000	25,00	33,58
B	Meningkatnya PAD		Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	1,95 %	5.381.652.600	0	-	3,70	2.586.532.600	Belum Bisa Diukur	855.725.870	Belum Bisa Diukur	33,08	Belum Bisa Diukur	855.725.870	Belum Bisa Diukur	15,90
II		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	2 %	5.381.652.600	0	-	6,40	2.586.532.600	Belum Bisa Diukur	855.725.870	Belum Bisa Diukur	33,08	Belum Bisa Diukur	855.725.870	Belum Bisa Diukur	15,90
			% Realisasi Pajak Daerah	90 %		0		90		69,06		76,73		69,06		76,73	
8		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapan Menjadi SKPD	138.478 WP	5.381.652.600	0	-	135.100	2.586.532.600	132.110	855.725.870	97,79	33,08	132.110	855.725.870	95,40	15,90
		Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	4 dok	129.829.400	0	-	2	64.829.400	0	22.290.070	0,00	34,38	-	22.290.070	0,00	17,17
		Sub Keg Analisa dan	Jumlah dokumen produk hukum	3 dok	192.954.200	0	-	2	94.104.200	2	47.421.770	100,00	50,39	2	47.421.770	66,67	24,58

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	2 dok		0		1		0		0,00		-		0,00	
		Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	14 keg	431.575.600	0	-	7	159.305.600	4	95.081.370	57,14	59,68	4	95.081.370	28,57	22,03
		Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	4 modul	919.123.600	0	-	2	459.123.600	0	53.705.340	0,00	11,70	-	53.705.340	0,00	5,84
			Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	24 bln		0		12		6		50,00		6		25,00	
		SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	138.478 WP	645.930.600	0	-	135.100	354.930.600	131.330	77.266.840	97,21	21,77	131.330	77.266.840	94,84	11,96
		SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	138.478 WP	106.921.000	0	-	135.100	51.921.000	132.110	20.253.870	97,79	39,01	132.110	20.253.870	95,40	18,94

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	132.848	WP 200.756.700	0	-	129.608	95.756.700	125.970	39.691.340	97,19	41,45	125.970	39.691.340	94,82	19,77
		SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	138.478	WP 1.265.561.100	0	-	135.100	615.561.100	132.110	127.955.600	97,79	20,79	132.110	127.955.600	95,40	10,11
		SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	% Permohonan konsultasi yang dilayani	100	% 25.240.000	0	-	100	10.240.000	50,00	6.050.000	50,00	59,08	50	6.050.000	50,00	23,97
		SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	132.848	WP 323.750.300	0	-	129.608	157.750.300	126.341	75.521.080	97,48	47,87	126.341	75.521.080	95,10	23,33
		SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	27	kali 450.882.000	0	-	12	210.882.000	5	112.239.310	41,67	53,22	5	112.239.310	18,52	24,89
			Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	2.719	WP	0	-	1.356	-	674	-	49,71	-	674	-	24,79	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2020)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100	% 346.143.100	0	-	100	146.143.100	50,00	77.454.810	50,00	53,00	50	77.454.810	50,00	22,38
		Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300	obj pjk 241.772.200	0	-	240	116.772.200	119	69.809.670	49,58	59,78	119	69.809.670	39,67	28,87
		SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	24	kali 101.212.800	0	-	12	49.212.800	6	30.984.800	50,00	62,96	6	30.984.800	25,00	30,61
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					33.778.757.996				13.591.462.996		4.847.728.351		35,67		4.847.728.351		14,35
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)												45,35	34,68	43,81	2.423.864.176	45,35	14,98

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi semester I Tahun 2021, sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kinerja capaian sasaran Bappenda Kota Cimahi terdiri dari :
 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator persentase peningkatan PAD per tahunnya yang terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, belum dapat diukur.
 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai predikat SAKIP perangkat daerah, nilai tersebut diperoleh dari laporan hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat kota belum dapat diukur, pengukuran dilakukan pada tahun berikutnya.
- Hasil pengukuran kinerja capaian program Bappenda Kota Cimahi terdiri dari :
 1. Program pegelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :
 - a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan belum dapat diukur, pengukuran dilakukan pada tahun berikutnya.
 - b. Realisasi pajak daerah
Hasil pengukuran kinerja realisasi pajak daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, parkir, penerangan jalan, hiburan, reklame, air tanah, PBB, dan BPHTB, dengan realisasi penerimaan pajak daerah sebagai berikut :

URAIAN	TARGET (Rp.)	TARGET SM I (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% SEMESTER I	% SETAHUN
HASIL PAJAK DAERAH	145.285.001.230	70.798.608.657	100.329.934.352	141,71	69,06
Pajak Hotel	274.703.500	140.320.419	143.008.676	101,92	52,06
Pajak Restoran	13.978.402.073	6.149.630.200	8.127.625.100	132,16	58,14
Pajak Hiburan	453.096.000	24.848.540	71.927.655	289,46	15,87
Pajak Reklame	1.748.195.268	636.090.918	1.037.606.900	163,12	59,35
Pajak Penerangan Jalan	36.049.763.147	17.856.053.272	18.970.630.459	106,24	52,62
Pajak Parkir	360.000.000	187.871.550	456.266.960	242,86	126,74
Pajak Air Tanah	6.360.000.000	2.902.558.200	4.003.433.070	137,93	62,95
Pajak BPHTB	33.560.450.000	8.566.449.336	28.582.700.179	333,66	85,17
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	52.500.391.242	34.334.786.222	38.936.735.353	113,40	74,16

Persentase realisasi capaian dari 9 objek pajak daerah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 29.531.325.695,- atau dengan persentase capaian 141,71%

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :
 - a. Nilai SAKIP perangkat daerah, indikator ini masih belum dapat diukur.
 - b. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum, dengan capaian kinerja sebesar 50% hal ini diukur dari 10 unit kerja yang ada di Bappenda sudah terlayani penyediaan komponen listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, cetakan dan penggandaan, fasilitasi tamu, dan fasilitasi koordinasi dan konsultasi selama 6 bulan.
 - c. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi, dengan capaian kinerja masih 0%, hal ini dikarenakan untuk pengukuran kinerja ini berdasarkan undangan bimtek bagi pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi dalam pemenuhan kompetensi.
- Penyempurnaan indikator kinerja yang disesuaikan dengan keluaran dari sub kegiatannya maupun kegiatan.
- Perubahan spesifikasi barang yang diperlukan sudah tidak tersedia di pasaran, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang tertunda, sehingga pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- Adanya pergantian pejabat di lingkungan Bappenda Kota Cimahi yang dapat menyebabkan keterlambatannya proses pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Bappenda Kota Cimahi

2.2.1. Analisis Desentralisasi Fiskal

Menurut Bisma (2010 : 78) Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Rumusan rasio desentralisasi fiskal yaitu :

ddf :
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 2.4
Analisis Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Tingkat Kemandirian Daerah
2017	1,481,647,893,979.88	383,911,991,301.88	25.91%	Sedang
2018	1,316,230,476,122.39	335,016,530,127.39	25.45%	Sedang
2019	1.433.371.386.973,96	360.955.331.172,96	25.18%	Sedang
2020	1.457.996.459.899,91	375.687.242.678,91	25.77%	Sedang

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis diatas maka secara umum indikator kinerja sasaran Bappenda Kota Cimahi dalam meningkatkan desentraliasasi fiskal di Kota Cimahi pada tahun 2017-2020 masih berada pada kategori posisi sedang.

Tabel 2.5
Komposisi PAD Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Komponen PAD	Realisasi	(%) Persentase Terhadap PAD
1	Pajak Daerah	158.937.237.899	42,31%
2.	Retribusi Daerah	15.243.650.522	4,06%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.778.080.000	2,60%
4.	Lain-lain PAD yang sah	191.728.274.258	51,03%
	JUMLAH	375.687.242.679	100%

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar dari PAD berasal dari komponen Lain-lain PAD yang sah, yang didalamnya merupakan pendapatan dari BLUD, yaitu sebesar 51,03%, kemudian disusul oleh komponen pajak daerah sebesar 42,31%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,60% dan retribusi daerah 4,06%.

2.2.2. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 - 2020

Capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi dari Tahun 2017 - 2020, setiap tahunnya melampaui dari target PAD yang telah di tetapkan, rata-rata persentase capaian sebesar 108,93%. Penyumbang PAD terbesar dilihat berdasarkan persentase rata-rata realisasi terhadap target dari setiap tahunnya berasal dari komponen pajak daerah sebesar 115,22%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 105,27%, kemudian retribusi daerah sebesar 103,64% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 101,03.

Tabel penyajian rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2017 - 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rata-Rata Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi
Tahun 2017 - 2020

No	Komponen PAD	Target				Realisasi				Capaian (%)				Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	Pajak Daerah	116.923.551.744	132.108.046.123,69	161.488.910.896,42	136.545.238.041	165.391.683.082	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	141,45	102,02	101,02	116,40	115,22
2.	Retribusi Daerah	9.354.664.440	13.042.067.600	14.585.901.970,86	14.825.308.328,71	10.239.610.285	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	109,46	93,70	108,55	102,82	103,63
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	100	100	100	104,12	101,03
4.	Lain-lain PAD yang sah	175.440.496.864,44	172.301.380.460,24	168.838.660.768	171.081.995.294,21	199.024.697.934,88	178.634.468.717,39	172.688.433.186,96	191.728.274.257,91	113,44	103,68	102,28	112,07	107,87
	JUMLAH	310.974.713.048,44	326.842.694.183,93	354.211.073.635,28	331.843.741.663,92	383.911.991.301,88	335.016.530.127,39	360.955.331.172,96	375.687.242.678,91	123,45	102,50	101,90	113,21	110,27

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 (diolah)

2.2.3. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengalami pertumbuhan positif dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pajak daerah pada tahun 2017-2020 sebesar 115,22%, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 116,40% dari target sebesar Rp. 136.545.238.041, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2017-2020

Komponen PAD	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	116.923.551.744	132.108.046.123,69	161.488.910.896,42	136.545.238.041	165.391.683.082	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	141,45	102,02	101,02	116,40

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 (diolah)

2.2.4. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh perangkat daerah penghasil, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil retribusi daerah pada tahun 2017-2020 sebesar 103,63%, sedangkan capaian realisasi dari hasil retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 102,82% dari target sebesar Rp. 14.825.308.328,71, hal tersebut merupakan pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2017-2020

Komponen PAD	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Retribusi Daerah	9.354.664.440	13.042.067.600	14.585.901.970,86	14.825.308.328,71	10.239.610.285	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	109,46	93,70	108,55	102,82

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 (diolah)

2.2.5. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu lembaga keuangan Bank oleh Bank Jabar, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2017-2020 sebesar 101,03 %, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 104,12 dari target sebesar Rp. 9.391.200.000, pendapatan ini mempunyai pertumbuhan yang tetap dan masih dalam pertumbuhan positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.9
Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2020

Komponen PAD	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	100	100	100	104,12

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018,2019, dan 2020 (diolah)

2.2.6. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Lain-lain PAD yang Sah

Hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi jasa usaha, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN pada FKTP, dan dana non kapitasi.

Rata-rata realisasi capaian dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2017-2020 sebesar 107,87%, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 112,07% dari target sebesar Rp. 171.081.995.294,21, pendapatan tersebut adanya pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Tahun 2017-2020

Komponen PAD	Target				Realisasi				(%) Persentase Terhadap PAD			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Lain-lain PAD yang Sah	175.440.496.864,44	172.301.380.460,24	168.838.660.768	171.081.995.294,21	199.024.697.934,88	178.634.468.717,39	172.688.433.186,96	191.728.274.257,91	113,44	103,68	102,28	112,07

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 (diolah)

2.2.7. Faktor Yang Mendorong Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui Pembayaran pajak daerah secara online yang mendorong kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, PT. Pos Indonesia dan e-commerce.
2. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan.
3. Pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
4. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan angka pengangguran oleh Pemerintah Kota Cimahi sehingga meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.
5. Kondisi makro ekonomi nasional yang kondusif.

2.2.8. Faktor Yang menghambat Peningkatan Pajak Daerah.

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional profesional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru Sita dan lainnya.
2. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.
3. Luas wilayah yang relatif kecil (40 km²) dimana sepertiga wilayah adalah pusat pendidikan militer.

- Masalah perizinan (Air tanah, reklame).
- Data Base belum valid (PBB).
- Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
- Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
- Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif dan pengaruh negatif eksternal lainnya.

2.2.9. Potensi Baru

Strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

- Pendekatan Teknis, yaitu :
 - Ekstensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan cara menggali/mencari potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.
 - Intensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi sumber PAD yang sudah ada.
- Pendekatan Yuridis, yaitu meningkatkan PAD melalui pembuatan atau penyempurnaan regulasi.

Gambar 2.1
Strategi Peningkatan Asli Daerah (PAD)



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappenda

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional professional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru sita dan lainnya.
2. Masalah perizinan (Air tanah, reklame).
3. Data Base belum valid (PBB).
4. Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Tidak adanya SDA potensial.
6. Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif.
7. Pertumbuhan ekonomi kota belum secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat.
8. Seiring berjalannya waktu maka potensi pajak meningkat namun belum dilakukan pembaharuan potensi pajak.

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan denganTupoksi.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi yang sinergis seoptimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
4. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
5. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini disajikan review terhadap Rancangan Awal RKPD :

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan target pajak daerah	2%	2.835.120.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan target pajak daerah	2%	2.835.120.000	
		% Realisasi pajak daerah	90%				% Realisasi pajak daerah	95%		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	138.478 WP	2.835.120.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	138.478 WP	2.835.120.000	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 Dokumen	65.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 Dokumen	65.000.000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	1 Dokumen	98.850.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	2 Dokumen Perwal	98.850.000	
		Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 Dokumen				Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 Dokumen		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diberi penyuluhan/ pendampingan	600 Orang	272.270.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	7 Kegiatan	272.270.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 Bulan	460.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 Bulan	660.000.000	Pengembangan sistem informasi e-PAD menjadi lebih luas
		Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 Modul				Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 Modul		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	138.478 WP	331.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	2969 WP	331.000.000	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	1328.478 WP	55.0000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	1328.478 WP	55.0000.000	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	132.848 WP	105.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	132.848 WP	105.000.000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	138.478 WP	650.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	138.478 WP	650.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan/ konsultasi	150 WP	15.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Cimahi	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100%	15.000.000	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	132.848 WP	166.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	132.848 WP	166.000.000	
Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	15 Kali	240.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	15 Kali	240.000.000	
		Jumlah penagihan kepada WP self dan official assessment	300 WP				Jumlah penagihan kepada WP self dan official assessment	300 WP		
		Jumlah penagihan pasif	1.116 WP							
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah penyelesaian keberatan dan pengurangan pajak daerah	600 WP	200.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%	200.000.000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 Objek Pajak	125.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 Objek Pajak	109.455.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah	12 Kali	52.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 Kali	52.000.000	
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	60,50	17.392.175.000	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	60,50	17.392.175.000	
		% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%				% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%		
		% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	76,19%				% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	76,19%		
Perencanaan, Penganggaran dan		Jumlah dokumen perencanaan,	15 Dokumen	160.000.000	Kegiatan Perencanaan,		Jumlah dokumen perencanaan,	15 Dokumen	160.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	85.000.000	
		Jumlah dokumen renja	1 Dokumen				Jumlah dokumen renja	1 Dokumen		
		Jumlah dokumen renja perubahan	1 Dokumen				Jumlah dokumen renja perubahan	1 Dokumen		
		Jumlah dokumen renstra	1 Dokumen				Jumlah dokumen renstra	1 Dokumen		
		Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 Kegiatan				Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 Kegiatan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	75.000.000	
		Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	2 Dokumen				Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	2 Dokumen		
		Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 Dokumen				Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 Dokumen		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen keuangan yang disusun	2 Dokumen	15.550.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen keuangan yang disusun	2 Dokumen	15.550.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	41 Pegawai	15.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	15.500.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 Dokumen	50.000.000	
Kegiatan Adminisitrasi Kepegawaian		Jumlah pegawai yang dibina	68 pegawai	130.000.000	Kegiatan Adminisitrasi Kepegawaian		Jumlah pegawai yang dibina	68 pegawai	21.750.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Perangkat Daerah					Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	68 stel	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	68 stel	70.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 Pegawai	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 Pegawai	60.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Pernagkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	944.500.000	Kegiatan Administrasi Umum Pernagkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	944.500.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan	3.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	13 unit (1 unit mesin perforasi, 2 unit mesin printronik, 6 unit computer/ laptop, dan 4 unit printer)	630.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	13 unit (1 unit mesin perforasi, 2 unit mesin printronik, 6 unit computer/ laptop, dan 4 unit printer)	630.000.000	
		Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan rumah tangga	20 Set	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	20 Jenis	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 Bulan	82.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 Bulan	82.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	90.000.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	90.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan	12 Bulan	14.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan	12 Bulan	14.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Perundang-undangan		bacaan dan buku peraturan			Peraturan Perundang-undangan		bacaan dan buku peraturan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	100.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	77.675.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	77.675.000	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor	12 Bulan	77.675.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gudang kantor	12 Bulan	77.675.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	130.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	130.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	100.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	100.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	30.000.000	
		Jumlah bulan jasa listrik	12 Bulan				Jumlah bulan jasa listrik	12 Bulan		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	400.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	400.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemberian BBM	12 Bulan	320.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemberian BBM	12 Bulan	320.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 Unit		Perlengkapan Kantor		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 Unit		
		Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 Unit				Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 Unit		
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 Unit				Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 Unit		
		Jumlah unit kendaraan yang disservice	10 Unit				Jumlah unit kendaraan yang disservice	10 Unit		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 Bulan	80.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 Bulan	80.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan renja dilaksanakan kegiatan forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mempertajam indikator dan sinergitas program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Dari pelaksanaan forum perangkat daerah itu sendiri diperoleh masukan, yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Peningkatan teknologi informasi terbaru dengan pembangunan/ pengembangan IT sebagai sarana komunikasi, layanan dan informasi lebih cepat dan mudah, memudahkan akses informasi, serta kemudahan dalam pelayanan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 222 bahwa elektronifikasi transaksi harus sudah dilaksanakan secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah paling lambat pada Tahun 2022.

Berikut ini usulan program dan kegiatan Bappenda Kota Cimahi dari para pemangku kepentingan pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Cimahi

Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan
Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan target pajak daerah	2%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	138.478 WP	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 Dokumen	
	% Realisasi pajak daerah	95%				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	1 Dokumen Perwal	
								Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 Dokumen	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	7 Kegiatan	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 Bulan	Pengembangan sistem informasi e-PAD menjadi lebih luas
								Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 Modul	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	2969 WP	
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	1328.478 WP	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan 9BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	132.848 WP	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	138.478 WP	
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan/ konsultasi	150 WP	
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	132.848 WP	

Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan
Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
						Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan opeasi sisir	15 Kali	
								Jumlah penagihan kepada WP self dan official assessment	300 WP	
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 Objek Pajak	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 Kali	
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	62,10	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	
								Jumlah dokumen renja	1 Dokumen	
	Jumlah dokumen renja perubahan	1 Dokumen								
	Jumlah dokumen renstra	1 Dokumen								
	Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 Kegiatan								
	% Unit kreja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	
								Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	2 Dokumen	
								Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 Dokumen	
	% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	76,19%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	2 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 Dokumen	
			Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina	68 pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	68 stel	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 Pegawai	
			Adminsitrasi Umum Pernaakat	Jumlah bulan penyediaan	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan	12 Bulan	

Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan
Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
			Daerah	administrasi umum		Kantor		penerangan		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	13 unit (1 unit mesin perforasi, 2 unit mesin printronik, 6 unit computer/ laptop, dan 4 unit printer)	
								Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	20 Jenis	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 Bulan	
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	12 Bulan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gudang kantor	12 Bulan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	
								Jumlah bulan jasa listrik	12 Bulan	
			Pemeliharaan	Jumlah bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemberian BBM	12 Bulan	

Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan
Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah yang dipelihara		Perlengkapan Kantor		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 Unit	
								Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 Unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 Unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 Unit	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 Bulan	

2.6. Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022

Tahapan perumusan rancangan akhir renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir renja PD berdasarkan perkara tentang RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam perkara tentang RKPD.

Rancangan akhir renja PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah perkara tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif renja PD selaras dengan perkara tentang RKPD dan renja PD lainnya

Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir renja PD kepada PD. Berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir renja PD. Rancangan akhir renja PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala Bappeda.

Penyusunan rancangan akhir rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 ini, telah dilakukannya tahapan-tahapannya yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan serta situasi dan kondisi permasalahan di Tahun 2022.

Berikut ini rancangan akhir rencana kerja program dan kegiatan Bappeda Kota Cimahi pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan target pajak daerah	3,58%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen	64.829.400	
	% Realisasi pajak daerah	95%				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	2 dokumen	81.004.200	
								Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 dokumen		
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	7 kegiatan	118.340.600	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul	434.123.600	
								Jumlah sistem yang diberikan pemeliharaan	3 sistem		
								Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan		
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP	264.930.600	
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP	51.921.000	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP	95.756.700	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP	528.761.100	
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP	157.750.300	
						Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	0 kali	142.795.800	
								Jumlah penagihan kepada WP self dan official assessment	1.616 WP		
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan	100%	142.663.100							

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
								pengurangan pajak daerah			
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 Objek Pajak	163.238.200	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali	88.617.800	
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,50	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	16 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen	78.451.700	
	% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%						Jumlah dokumen renja	1 dokumen		
								Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen		
								Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan		
	% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	58,97%				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen	66.315.000	
								Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	2 dokumen		
								Jumlah dokumen SAKIP	1 dokumen		
								Jumlah dokumen SKM	1 dokumen		
								Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan				12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali	9.261.234.096
									Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	12 kali	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	50.747.400
	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				2 kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6 stel	6.814.800
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	2 pegawai	23.430.000
									Jumlah pegawai yang dibina	70 pegawai	
Admistrasi Umum Pernagkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	2.399.800				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	0 unit	82.657.100				

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
								Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	17 jenis/ set	7.892.400
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 bulan	81.390.000
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah jenis barang cetakan	7 jenis	85.669.100
								Jumlah bulan penggandaan	12 bulan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bulan	4.000.000
								Jumlah buku peraturan	0 buku	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	4.685.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan	93.525.000			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	1 unit	77.675.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 bulan	97.224.200
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan	28.200.000
								Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan	198.920.000
								Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan	65.500.000
Jumlah Pagu Indikatif										12.651.462.996

Berikut penyajian proyeksi target pendapatan daerah kota cimahi tahun 2021-2022 dan realisasi pendapatan daerah tahun 2018-2020 yang merupakan capaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Pengelola Pendapatan daerah Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2018-2020

URAIAN ***)	2018	2019	2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	1.316.230.476.122,39	1.433.371.386.973,96	1.457.996.459.899,91
Pendapatan Asli Daerah	335.016.530.127,39	360.955.331.172,96	375.687.242.678,91
- Hasil pajak daerah	134.770.330.583,00	163.136.977.065,00	158.937.237.899,00
- Hasil retribusi daerah	12.220.530.827,00	15.832.320.921,00	15.243.650.522,00
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.297.600.000,00	9.778.080.000,00
- Lain-lain PAD yang Sah	178.634.468.717,39	172.688.433.186,96	191.728.274.257,91
Pendapatan Transfer	916.069.360.336,00	931.014.312.547,00	908.245.298.628,00
Transfer Dana Perimbangan	788.025.064.842,00	801.160.744.727,00	789.281.907.731,00
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	66.808.176.054,00	60.483.901.742,00	89.106.849.828,00
- Dana alokasi umum	576.278.051.000,00	598.700.744.000,00	539.717.972.000,00
- Dana alokasi khusus	144.938.837.788,00	141.976.098.985,00	160.457.085.903,00
Transfer Pemerintah Provinsi	128.044.295.494,00	129.853.567.820,00	118.963.390.897,00
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	128.044.295.494,00	129.853.567.820,00	118.963.390.897,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65.144.585.659,00	141.401.743.254,00	174.063.918.593,00
- Pendapatan hibah	2.192.000.000,00	1.792.065.471,00	140.839.566,00
- Dana darurat	-	-	-
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	10.167.148.716,00	48.860.258.783,00	23.922.151.027,00
- Dana Alokasi Cukai	-	-	-
- Dana Insentif Daerah	4.500.000.000,00	42.092.139.000,00	97.730.028.000,00
- Dana Bos	48.285.436.943,00	48.657.280.000,00	52.270.900.000,00
- Dana Pengembalian dari Pusat	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2018, 2019 dan 2020 (diolah)

Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020, sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 375.687.242.678,91 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.457.996.459.899,91, maka realisasi rasio

- PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 25,77%. Sementara untuk kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya.
2. Capaian kinerja sasaran dalam meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 375.687.242.678,91 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 360.955.331.172,96, terrealisasi peningkatannya sebesar 4,08% dari target -8,07%, capaian tersebut dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

Tabel 2.14
Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021-2022

URAIAN	2021	2022
	Target Perubahan (Rp.)	Target (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	1.653.421.850.677	1.081.968.289.266
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	294.610.266.073	346.310.021.421
Hasil Pajak Daerah	145.285.001.230	150.489.813.568
Hasil Retribusi Daerah	11.894.826.000	13.446.340.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000	9.391.200.000
Lain-lain PAD yang Sah	127.473.478.843	172.982.667.853
Pendapatan Transfer	1.358.811.584.604	735.658.267.845
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	803.179.423.501	607.187.277.501
Dana Bagi Hasil (DBH)	76.761.299.501	76.761.299.501
Dana Alokasi Umum (DAU)	530.425.978	530.425.978
Dana Alokasi Khusus (DAK)	143.784.767.000	0
Dana Insentif Daerah (DID)	52.247.274.000	
Pendapatan Hibah	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.421.829.239	128.470.990.344
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	144.421.829.239	128.470.990.344
Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	411.210.331.864	0

Sumber : Bidang Identifikasi Pendapatan (Data proyeksi target perubahan Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAHI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut :



Visi dan misi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dapat terwujud jika didukung pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik agar kemandirian dalam segi pembiayaan pembangunan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik akan mendukung dalam menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah, yang merupakan cikal bakal dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri.

Agenda pembangunan nasional untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya menjadi tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan strategis Bappenda. Hal ini tercantum dalam Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat berkaitan dengan agenda ini.

Bappenda Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki peran yang strategis dalam pendanaan pembangunan di daerah Kota Cimahi. Kelancaran pembangunan Kota Cimahi akan sangat bergantung pada keberhasilan Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola pendapatan daerah.

Isu strategis Bappenda Kota Cimahi akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMN dan RPJMD. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Cimahi Tahun 2017-2022, adalah :

1. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan
2. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi
3. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Penanggulangan Pengangguran
6. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan
7. Optimalisasi Peran Sektor Industri Kecil Menengah, Perdagangan Dan Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah
8. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
9. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
12. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
13. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
14. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
15. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

3.2. Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan dan terjalinnya sinergitas antara Pembangunan Pusat dan Daerah harus tercipta dengan baik, karena pada hakekatnya baik Pusat maupun Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat madani yang sejahtera serta mandiri.

Daerah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut tentunya memiliki visi dan misi pembangunan termasuk Kota Cimahi, dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017-2022, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi serta target yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai Visi yaitu :

“PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan dua misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi :

- Pertama,** Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
- Kedua,** Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung;

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir (*Ultimate Goal*) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Bappenda merupakan penjabaran dari RENSTRA dan RPJMD Kota

Cimahi, yaitu meningkatkan desentralisasi fiskal dengan indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Sasaran organisasi juga merupakan penjabaran dari RENSTRA dan RPJMD Kota Cimahi. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator persentase peningkatan PAD per tahunnya. Sasaran ini menjadi tanggung jawab pencapaian kinerja Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran Bappenda beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Desentralisasi Fiskal		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	32,01%
	Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	17,55%

Sumber : Data proyeksi perubahan target pendapatan tanggal 6 agustus 2021

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Yang sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam hal ini yang dimaksud program kerja adalah susunan rencana kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan.

Rencana kerja Bappenda Kota Cimahi disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang selaras dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah, Bappenda Kota Cimahi telah menyusun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- I. Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2. Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 4. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 5. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 6. Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 7. Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 8. Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 9. Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - 10. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
 - 11. Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - 12. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

13. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

2 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

14.Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

15.Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

16.Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

17.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD

IV. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

18.Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

V. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

19.Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

20.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

21.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

22.Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik

23.Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

24.Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

25.Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VI. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

26.Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

27.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 28.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- VIII. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 29.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 30.Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan yang disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menjadi salah satu program prioritas RPJMD Kota Cimahi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, yang dijabarkan Bappenda Kota Cimahi kedalam rencana kegiatan berikut sub-sub kegiatannya untuk setiap program yang didasarkan dari penentuan strategi dan arah kebijakan Bappenda Kota Cimahi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program disertai indikator kinerja dan kebutuhan pendanaannya, yang diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan dari tujuan, sasaran dan program.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang sedang dihadapi, dan usulan program/ kegiatan dari masyarakat disinergikan dengan tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi, maka diperoleh Rencana Kerja dan Pendanaan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022, sebagaimana disajikan dalam tabel, berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2022

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan target pajak daerah	3,58%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yag ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen	64.829.400
	% Realisasi pajak daerah	95%				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	2 dokumen	81.004.200
								Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 dokumen	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	7 kegiatan	118.340.600
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul	434.123.600
								Jumlah sistem yang diberikan pemeliharaan	3 sistem	
								Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP	264.930.600
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP	51.921.000
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP	95.756.700
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP	528.761.100
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP	157.750.300
						Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	0 kali	142.795.800
								Jumlah penagihan kepada WP self dan official assessment	1.616 WP	
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%	142.663.100

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 Objek Pajak	163.238.200
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali	88.617.800
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,50	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	16 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen	78.451.700
	% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%						Jumlah dokumen renja	1 dokumen	
								Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen	
								Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan	
	% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	58,97%				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen	66.315.000
								Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	2 dokumen	
								Jumlah dokumen SAKIP	1 dokumen	
								Jumlah dokumen SKM	1 dokumen	
								Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali	9.261.234.096		
						Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	12 kali			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	50.747.400		
	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6 stel	6.814.800		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	2 pegawai	23.430.000		
						Jumlah pegawai yang dibina	70 pegawai			
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	2.399.800		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	0 unit	82.657.100
				Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan					

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	17 jenis/ set	7.892.400
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 bulan	81.390.000
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah jenis barang cetakan	7 jenis	85.669.100
								Jumlah bulan penggandaan	12 bulan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	12 bulan	4.000.000
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	4.685.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan	93.525.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	1 unit	77.675.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 bulan	97.224.200
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan	28.200.000
								Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan	198.920.000
								Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan	65.500.000
Jumlah Pagu Indikatif										12.651.462.996

(Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 Terlampir).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Bapenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai satu kesatuan arah perencanaan strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Renja PD tersebut sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, selain itu dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Rancangan renja PD Tahun 2022, ini nantinya akan menjadi tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Bappenda Kota Cimahi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana kerja PD Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Renja PD Tahun 2022 memuat 1 (satu) unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan keuangan, terdiri dari 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah yang mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.651.462.996,- (*dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*), terdiri dari :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.334.732.400,- (*dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*), sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 10.316.730.596,- (*sepuluh milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah*), adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

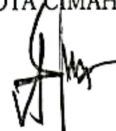
Dengan tersusunnya rencana kerja PD ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional atau prioritas daerah.

Demikian rencana kerja PD ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja PD ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Cimahi, Agustus 2021

KEPALA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002